

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Elly Sumantry

NIM : 20150610254

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASIDALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL DI
KABUPATEN BANTUL

Pembimbing : Bagus Sarnawa, SH.,M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 14%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 29-1-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I

PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BANTUL

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hukumonline.com Internet Source	3%
2	es.slideshare.net Internet Source	3%
3	aswinsh.files.wordpress.com Internet Source	1%
4	anzdoc.com Internet Source	1%
5	disnakertrans.jabarprov.go.id Internet Source	1%
6	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	1%
7	rikiseptiawan180991.blogspot.com Internet Source	1%
8	nthaulmi.blogspot.com Internet Source	1%

9	abstrak.ta.uns.ac.id Internet Source	1%
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
11	kata2bijakpolitik.blogspot.com Internet Source	1%
2	dwiratnasari770.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3495 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Prosedur Pelayanan izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhat kan : Surat dari : Fakultas Hukum UMY
Nomor : 323/A 4-I /XII/2018
Tanggal : 11 Desember 2018
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1. Nama : ELLY SUMANTRY
2. NIP/NIM/No.KTP : 5204265405970001
3. No. Telp/ HP : 082324075695

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BANTUL
- b. Lokasi : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul
- c. Waktu : 12 Desember 2018 s/d 12 Juni 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat izin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 12 Desember 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan


TRI SUMIATI, SH

NIP: 19680626 199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)



SURAT KETERANGAN

Nomor :420/ 975 /Pend/2019

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

N a m a : Ir. HERU SUHADI, MT
N I P : 195812291993031002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV c
J a b a t a n : Kepala Dinas

Menerangkan bahwa :

NO	NAMA	NIM
1.	Elly Sumantry	20150610254
2.	Nur Khusnul Khotimah	20150610110
3.	Granisa Tijayati	20150610090

Telah Melaksanakan Penelitian selama 1 minggu teritung mulai tanggal 12 Desember 2018 –
20 Desember 2018 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas
Ir. HERU SUHADI, MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 195812291993031002

PERSETUJUAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adrian Edgar Kalinin
Jabatan : Direktur
Alamat : PT Jago Furniture
Jl Parangtritis Km 7 Cabean Panggunharjo Sewon Bantul

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut **Pihak Pertama (I)**

Nama : Haryanto
Jabatan : Quality Control
Alamat : Pedusan Rt 58 Argosari
Sedayu Bantul

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut **Pihak Kedua (II)**

Pada hari ini : Senin 3 Desember 2018 telah diadakan perundingan secara musyawarah dan mufakat antara pihak (I) dan pihak (II) dan telah tercapai persetujuan atau kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa mulai hari : Senin 3 Desember 2018 Pihak (I) dan Pihak (II) sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri.
2. Bahwa dalam hal ini Pihak (I) akan memberikan uang tali kasih sesuai dengan kwitansi terlampir.
3. Bahwa setelah ditanda tangani Surat Persetujuan Bersama ini masing-masing Pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun di kemudian hari.


Bantul, 3 Desember 2018

PIHAK Ke II

PIHAK Ke I


(Haryanto) (Adrian Edgar Kalinin)

Mengetahui dan Menyaksikan
Mediator Hubungan Industrial
Kabupaten Bantul,



**PERMOHONAN PENCATATAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Nomor : 20

Perihal : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pencatatan

Kepada :

Yth. Bpk. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
Jl. Gatot Subroto No.1 Bantul
di - BANTUL.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya maksimal untuk mengusahakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara :

1. Nama Perusahaan :
Jenis usaha :
Alamat :

Dengan

2. Nama Pekerja / Buruh / SP / SB :
Alamat :
.....

masalah
.....
.....

Maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 4 UU No.2 Tahun 2004, pasal 4 ayat (1) dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk dicatat dan membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan risalah perundingan terlampir.

Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

*) Pihak Pengusaha, Pihak Pekerja / Buruh / SP / SB

(.....)

Coret yang tidak perlu.

**FORM PENGADUAN
MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DISNAKERTRANS KABUPATEN BANTUL**

1 Nama : _____

2 Nomor Telepon : Rumah : _____
HP : _____

3 Alamat / Tempat Tinggal : _____

4 Tempat, Tgl lahir (Umur) : _____

5 Jabatan : _____

6 Pendidikan : _____

7 Status Pekerja : Kontrak / PKWT dari sampai dengan
Tetap / PKWTT sejak tanggal

8 Surat PHK : No. : _____
Tanggal : _____

9 Pengupahan : _____
a. Upah Pokok : Rp. _____
b. Tunjangan Tetap : Rp. _____
c. Tunjangan Tidak Tetap
- Tunjangan : Rp. _____
- Tunjangan : Rp. _____
- Tunjangan : Rp. _____
d. Lain-lain Rp. _____
Jumlah : Rp. _____

10 Masa Kerja : Tahun Bulan

11 Nama Perusahaan : _____

12 Alamat Perusahaan : _____

13 Nama Pimpinan Perusahaan : Telp. _____

14 Serikat Pekerja / Serikat Buruh : Telp. _____
Tidak Ada / Ada
Jika Ada Nama SP/SB.....

15 Menjadi Anggota SP/SB : Ya / Tidak

16 Tuntutan : 1. _____
2. _____
3. _____

17 Alasan Tuntutan : 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

18 Perundingan Bipartit : Tidak Pernah / Pernah
Jika pernah, dilaksanakan pada tanggal.....
Dengan hasil.....

19 Risalah Perundingan Bipartit : Tidak Ada / Ada

20 Keterangan lain (jika ada) : _____

Bantul, _____

**FORM PENGAJUAN
HAK KARYAWAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DISNAKERTRANS KABUPATEN BANTUL**

1 Nama Pekerja : _____

2 Nomor Telepon : Rumah : _____
HP : _____

3 Alamat / Tempat Tinggal : _____

4 Tempat, Tgl lahir (Umur) : _____

5 Jabatan : _____

6 N I K : _____

7 Pendidikan : _____

8 Status Pekerja : Kontrak / PKWT dari sampai dengan
Tetap / PKWTT sejak tanggal

9 Surat pengalaman kerja : No. : _____
Tanggal : _____

10 Pengupahan : _____
a. Upah Pokok : Rp. _____
b. Tunjangan Tetap : Rp. _____
c. Tunjangan Tidak Tetap
- Tunjangan : Rp. _____
- Tunjangan : Rp. _____
d. Lain-lain Rp. _____
Jumlah : Rp. _____
..... Tahun Bulan

11 Masa Kerja : _____

12 Tanggal mulai bekerja : _____

13 Tanggal berhenti bekerja : _____

14 Nama Perusahaan : _____

15 Alamat Perusahaan : _____
Telp. _____

16 Nama Pimpinan Perusahaan : _____
Telp. _____

17 Permohonan hak berupa : _____

18 Besarnya : _____

Bantul, _____

Mengetahui :
Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kab. Bantul